

Evolusi Teori Sistem dan Pengawasan Penyiaran

Harmonis

Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

harmonis@umj.ac.id

Abstrak

Evolusi teori merupakan sebuah keniscayaan. hal ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain karena perkembangan teknologi dan hasil kajian yang dilakukan oleh banyak pakar yang terkait dengan teori yang dimaksudkan. Termasuk dalam hal ini teori yang berkenaan dengan media. Dalam konteks kajian ini, kajian bertujuan untuk mengungkapkan tentang perkembangan yang berkenaan dengan teori sistem dan pengawasan penyiaran berdasarkan kepada pendapat para *scholar* (pakar). Mulai dari yang pertama kali menggagas ataupun mengemukakan teori sistem dan pengawasan penyiaran, hingga teori yang terbaru. Kajian ini termasuk kedalam kelompok kajian *library research* atau studi kepustakaan dengan mencari dan menganalisis serta memaparkan beberapa sumber (*reference*) yang mengkaji tentang evolusi teori sistem dan pengawasan dibidang penyiaran. Hasil kajian (studi) memperlihatkan bahwa teori tentang sistem dan pengawasan penyiaran dimulai dari teori yang dikemukakan oleh Siebert dan kawan-kawan pada tahun 1956 dengan *fourth theory of the press*. Dan berakhir (sampai studi ini dilakukan) pada teori terbaru yang dikemukakan oleh Sydney Head dengan teori sistem penyiaran dunianya (*broadcasting system in the world*). Kesimpulannya, bahwa teori tentang sistem dan pengawasan penyiaran bukanlah teori yang bersifat statis, melainkan dinamis. Untuk itu, sudah menjadi keniscayaan ataupun keharusan untuk selalu melakukan kajian yang berkenaan dengan sistem dan pengawasan penyiaran sehingga teori menjadi lebih sempurna sesuai dengan zamannya.

Kata kunci : *evolusi, pengawasan, penyiaran, pers, system dan kontrol*

THE EVOLUTION OF BROADCASTING SYSTEM THEORY AND CONTROL

Abstract

The evolution of theory is a necessity. this is caused by many factors, among others due to technological developments and the results of studies conducted by many experts related to the intended theory. This includes theories relating to the media. In the context of this study, the study aims to reveal developments related to systems theory and broadcasting control based on the opinions of scholars (experts). Starting from those who first initiated or developed the theory of broadcasting systems and control, to the latest theories. This study belongs to the library research study group or literature study by searching for and analyzing as well as describing several sources (references) that examine the evolution of systems theory and control in the broadcasting sector. The results of the study show that the theory of broadcasting systems and control begins with the theory proposed by Siebert and colleagues in 1956 with the fourth theory of the press. And ends (until this study is carried out) on the latest theory put forward by Sydney Head with his world broadcasting system theory (broadcasting system in the world). The conclusion is that the theory of broadcasting systems and control is not a static theory, but a dynamic one. For this reason, it has become a necessity or a necessity to always conduct studies relating to broadcasting systems and control so that the theory becomes more perfect in accordance with its era.

Keywords: *broadcasting, evolution, press, system and control*

PENDAHULUAN

Setiap negara mempunyai sistem akhbar atas persnya sendiri, kata Syed Arabi Idid (dalam A. Mehra, 1989). Sistem ini merupakan peraturan atau tata cara berkenaan dengan bagaimana media massa di Negara tersebut menjalankan aktivitasnya. Sistem pers (cetak dan penyiaran) mungkin sama atau berbeda antara masing-masing Negara. Menurut Syed Arabi Idid lagi, sistem akhbar dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya, faktor sejarah Negara bersangkutan, bentuk penduduk, dasar negara, pembangunan ekonomi, politik, dan sistem perundang-undangannya. Ini ditegaskan oleh Rivers dan Schramm (1969: 29), komunikasi massa semenjak dibentuk, diwarnai dan dipengaruhi oleh masyarakat negara dimana komunikasi massa yang bersangkutan menjalankan aktivitasnya.

Beraneka ragam teori telah dikemukakan oleh para scholar (pakar) dalam upaya untuk mengetahui dan memahami tentang sistem penyiaran (bagian dari sistem). Pada tahun 1956, yang pertama kali melakukan usaha ke arah itu ialah Siebert, Peterson, dan Schramm (1956) yang memperkenalkan empat teori, fourth theory of the press, yaitu Authoritarian, Libertarian, Tanggungjawab Sosial, dan Komunis Soviet (atau Totalitarian Soviet) berlandaskan atau berbasiskan kepada kepercayaan tertentu dan asumsi yang dipegang oleh masyarakat, yaitu kondisi manusia, masyarakat dan Negara, hubungan manusia dengan Negara, dan kondisi ilmu dan kebenaran (Siebert et al.: 1956).

Empat teori tersebut telah lama dipergunakan, bahkan sudah dianggap sebagai teori yang klasik. Bagaimanapun, karena perkembangan zaman dan juga disebabkan oleh pemikiran baru, dipahami empat teori tersebut tidak mencakup semua sistem di semua Negara di dunia. Bahkan, teori Komunis Soviet dinyatakan oleh sebagian scholar (pakar) telah ketinggalan zaman karena Negara Uni Soviet telah bubar.

Beberapa teori lain diusulkan. Dalam tahun 1981, Hachten (1981) mengemukakan lima konsep berdasarkan kepada empat teori yang pertama, tetapi Hachten menyebutnya dengan istilah Konsep Authoritarian, Konsep Barat, (menggabungkan Kebebasan dan tanggungjawab Sosial), Konsep Komunis, dan menambah dua konsep lain, yaitu Konsep Revolusioner dan Konsep Pembangunan. Selanjutnya, dalam tahun 1983 diikuti oleh McQuail (1983) yang merumuskan enam teori norma media, empat dari teori tetap berdasarkan kepada pendapat yang dikemukakan oleh Siebert et al., dengan mengganti nama Libertarian dengan istilah Teori Libertarian dan Komunis Soviet menjadi Teori Media Soviet, sedangkan untuk teori Authoritarian dan Tanggungjawab Sosial tidak mengalami perubahan dan tetap dengan istilah yang sama. McQuail (1983) menambah dua teori lain, yaitu Teori Media Pembangunan dan Teori Penyertaan Demokrasi Media (Democratic-participant media). Namun McQuail (1983) tidak menyebut tentang sumbangan dari Hachten meskipun terdapat sedikit persamaan dari segi istilah atau penyebutan Konsep Pembangunan oleh Hachten dengan Teori Pembangunan Media oleh McQuail karena McQuail menyandarkan teori itu kepada laporan dari Komisi McBride yang didirikan oleh UNESCO (Safar: 2004).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat studi literatur (*literature review*) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama. Studi literatur juga dikatakan sebagai seluruh kegiatan untuk memperoleh informasi yang relevan atau berkaitan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan

sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain (Dwi et al., 2021)

Pendapat lain juga menyatakan bahwa studi kepustakaan ini merupakan teknik pengumpulan data atas telaah buku, catatan, laporan dan juga termasuk pemberitaan yang berkaitan dengan masalah yang ingin analisis (Natawilaga 2018) Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari literatur-literatur yang relevan baik buku maupun jurnal, selain itu penelitian ini juga memperoleh data dari publikasi media di internet.

Penelitian ini juga memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis mengenai evolusi teori sistem dan pengawasan penyiaran. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan berbagai artikel ataupun dokumentasi yang terkait dengan evolusi teori sistem dan pengawasan penyiaran, kemudian mereduksi data, dan mengklasifikasikannya. Setelah itu dilakukan analisis yang mendalam dan dibuat sebuah kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evolusi Teori Sistem dan Pengawasan Penyiaran

Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm

Pada tahun 1956, Fred Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm berupaya menjelaskan tentang konflik antara Negara dan seperti mencipta ungkapan “sistem pengawasan sosial mengubah hubungan antara individu dan institusi (lembaga). Menurut mereka tipologi sistem terdiri dari, sistem Autoritarian, Libertarian, Tanggungjawab Sosial, dan Komunis Soviet. Teori ini membicarakan tentang apa yang (institusi penerbitan media, baik institusi surat kabar, maupun penyiaran) boleh dan tidak boleh lakukan. Sebenarnya pendapat mereka hanya membicarakan tentang

dua teori, yaitu Autoritarian dan Libertarian, sementara dua konsep yang lain hanyalah sebagai usaha pengembangan dan melakukan penyesuaian terhadap dua teori yang pertama.

Autoritarian

Teori yang tertua ialah Autoritarian, yang dilahirkan pada zaman Gutenberg (Merril: 1991). Malah Tuah Iskandar (1997) menyatakan bahwa pada zaman Plato hingga zaman Machiavelli, teori Authoritarian diterima sebagai teori komunikasi yang terbaik. Teori Authoritarian dipertahankan dan dikembangkan selama beberapa abad kemudian. Dalam masyarakat tersebut, kebenaran berita diserahkan ataupun tergantung kepada pemerintah, yang seterusnya mengembangkan berita yang benar kepada masyarakat.

Dengan kata lain, fungsi media adalah untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang apa yang diinginkan oleh pemerintah berkenaan dengan apa yang ingin diketahui oleh masyarakatnya. Dalam sebuah sistem, media diberi tanggungjawab untuk memastikan kebenaran berita atau informasi yang disediakan oleh pemerintahan sebagai satu usaha untuk menghindarkan berbagai tantangan terhadap berita-berita yang dimaksudkan, seorang kepala negara ataupun pemerintahan dan permaisuri (ibu negara) hanya mengizinkan eksistensi media dengan seizin pemerintah, meskipun dalam keadaan yang sama kepemilikan swasta juga diizinkan. Tetapi izin ataupun surat izin (terbit dan siaran) dapat dicabut atas kehendak kepala negara atau pemerintahan dan hak untuk menyensor berita sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah.

Pers sebenarnya menjadi agen pemerintah. Peranan ini tidak dapat dipersoalkan (dipermasalahan) karena ia merupakan falsafah dan hak yang terbaik atau kuasa yang mutlak hanya dikuasai oleh pemerintah (presiden ataupun perdana menteri). Teori kuasa Autoritarian tidak pernah hilang meskipun sebelum pengaruh kekuasaan presiden atau perdana menteri mulai berakhir.

Konsep Autoritarian ini tetap ada di Negara-negara di mana pemerintahannya mempunyai kekuasaan yang sangat kuat, terlebih lagi kekuasaan mutlak (tidak terbatas).

Libertarian

Teori Libertarian dijumpai Pada zaman Milion, Locke dan Mill (Tuah Iskandar: 1997). Teori ini dikatakan telah tersusun dengan sangat rapi sebagai persembahan atau hadiah terhadap pers pada zaman itu. Teori Libertarian sebaliknya, seperti Siebert, Peterson, dan Schramm jelaslah dan uraikan berkaitan dengan satu sistem kekuatan sosial itu. Dalam teori Libertarian, baik laki-laki maupun perempuan tidak lagi menjadi penerima berita atau informasi yang pasif, seperti ditentukan oleh pemerintah. Sebaliknya, mereka sebagai manusia yang matang dan mampu membedakan antara yang benar dan yang salah.

Selain itu, hak untuk mencari kebenaran dapat dilakukan oleh setiap orang. Media berperan untuk membantu guna mencari kebenaran itu. Ini ditindaklanjuti bahwa dalam sistem Libertarian, suatu media tidak boleh semata-mata tunduk dan patuh kepada pemerintah, tetapi ia hendaklah bebas berautonomi, bebas bersuara, bahkan dalam konteks idea yang lebih menantang dengan tanpa takut terhadap campur tangan dari pemerintah. Keyakinan ini adalah sesuatu yang paling utama dalam penulisan, dan kehancuran suatu sistem penyensoran dijelaskan oleh John Milton, seorang ahli falsafat teori Libertarian di Areopagitica. Menurutnya, “Siapa saja yang membunuh seseorang pada dasarnya telah membunuh satu makhluk yang sehat, citra Tuhan; tetapi siapa yang merusakkan sebuah buku yang baik, ia membunuh citra Tuhan”.

Konsep Libertarian berarti manusia, yaitu sebagai manusia yang rasional hendaklah bebas dalam mencari kebenaran, dan media itu adalah sebagai teman setia dalam proses mencari kebenaran itu – media dalam satu sistem Libertarian hendaklah juga mampu menilai sebuah pemerintah – ini disebut sebagai

peranan mengawasi dari media. Sebaliknya, media dikuasai oleh atau proses mencari kebenaran secara mandiri. Proses ini dijelaskan oleh Hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat, Oliver Wendell Holmes dalam bukunya yang berjudul *Abram v. United States* (1919) sewaktu beliau menulis pendapatnya yaitu, “ujian terbaik suatu kebenaran, merupakan kuasa suatu fikiran yang dapat diterima dalam suatu pasar”. Konsep pasar idea yang bebas ini memastikan semua anggota masyarakat, baik dari golongan minoritas atau mayoritas mendapatkan hak yang sama dalam media. Media yang dimaksudkan itu bisa mempopulerkan teori Libertarian itu sendiri.

Dalam teori Libertarian, pers juga tidak dibenarkan menjadi alat pemerintah. Ia adalah alat untuk menyebarkan, mendistribusikan segala kenyataan dan laporan dengan tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Namun bagaimanapun teori Libertarian telah mengakibatkan pengaruh negatif hingga bisa menggugat pemerintah. Masyarakat umum pula curiga terhadap laporan-laporan para wartawan tentang suatu masalah yang mereka anggap “semakin liar” dan tidak terkendali. Hitung-hitung demokrasi, malah yang terjadi mengarah kepada (bahkan ada yang termasuk ke dalam kategori) anarki.

Ringkasnya, di bawah teori Libertarian keutamaan ataupun keistimewaan diberikan kepada individu, bukan kepada Negara. Untuk itu, pers di Negara-negara yang menganut system ini seluruhnya dimiliki oleh swasta dan bebas dari pengaruh pemerintah. Pers juga memiliki kebebasan yang luas untuk mengetahui, memberitakan tentang setuju atau tidak setuju, menyampaikan hal-hal yang bersifat positif dan negative, membicarakan, mendiskusikan tentang sesuatu dan lain sebagainya.

Tanggung jawab Sosial

Pada zaman lahirnya golongan kesadaran, seiring dengan “revolusi komunikasi” di awal kurun ke-20-an, khususnya pada tahun 1919,

teori Tanggungjawab Sosial yang berasaskan revolusi komunikasi mengambil alih. Tegasanya, ketika Holmes menulis pendapatnya berhubung dengan Abrams, yaitu konsep pasar bebas tersebut hampir-hampir mencapai realitasnya dibandingkan dengan hampir seperempat abad sebelumnya. Kondisi ini terjadi ketika satu Komisi dibentuk untuk mengkaji tentang kedudukan kebebasan media. Di bawah kepimpinan Robert M. Hutchins, Censelor dari University Chicago, Komisi itu memperoleh data bahwa kebebasan pers akan menjadi lebih berbahaya jika sistem monopoli yang sudah ada berkembang biak dengan tanpa kendali.

Sangat sedikit pemilik (owner) yang menguasai teknologi penyiaran yang dapat memberi pengaruh terhadap hak komunikasi yang dinikmati oleh segelintir masyarakat. Komisi ini mengusulkan supaya pemilik media mempunyai tanggungjawab yang lebih besar kepada masyarakat. Ia juga memberi hak yang lebih liberal termasuk kebebasan hak menjawab. Anggota lembaga Komisi ini merasa tidak senang dengan kuasa pemilik media yang senantiasa meningkat, atau tidak senang terhadap manajemen yang menguasai berita-berita yang sama seperti yang di lakukan oleh pemerintah Autoritarian pada zaman Gutenberg. Menurut Siebert, Peterson, dan Schramm, ketidak puasan ini menjadi dasar dari kelahiran teori Tanggungjawab Sosial, yaitu sebagai satu penyesuaian atau pembaharuan terhadap teori Libertarian. Tanggungjawab Sosial berbeda dengan Libertarian karena fungsi pers adalah satu media diskusi guna menangani suatu perbedaan. Sedangkan di bawah sistem Libertarian, pers berfungsi sebagai agen pemerintah. Selain itu, teori Libertarian menunjukkan bahwa media boleh dinikmati oleh mereka yang memiliki sumber-sumber ekonomi saja. Sebaliknya, teori Tanggungjawab Sosial menekankan pada bahwa setiap orang yang memiliki idea berhak menggunakan media. Perbedaan ketiga antara dua teori tersebut ialah pers Tanggungjawab

Sosial dikuasi oleh pendapat banyak pihak, tindakan pengguna, dan etika professional, sedangkan teori Libertarian tergantung kepada pasar idea yang bebas untuk membuat pembenaran apa saja.

Komisi Hutchins (1947) mengusulkan bahwa jika pers itu tidak menghargai dan memenuhi Tanggungjawab Sosial, maka organisasi-organisasi yang lain hendaklah bertanggungjawab untuk menggalakkan pers guna melakukan tugas tersebut. Komisi mengusulkan tentang pembentukan sebuah agensi (agen) independen yang menilai prestasi pers dan melaporkannya setiap tahun.

Walaupun masyarakat melakukan sesuatu dengan berlebih-lebihan terhadap media guna menyuarakan pendapat mereka sehubungan dengan anjuran Komisi Hutchins, beberapa tindakan telah dilaksanakan ke arah menciptakan sebuah pers yang lebih bertanggungjawab terhadap masalah sosial. Contohnya, beberapa kode etik dilaksanakan, space atau ruang-ruang pendapat ditambah untuk pembaca pers dalam rangka memberi masukan, program berorientasi kepada pengguna (user) sekarang lazim ditayangkan di televisi pada tingkat local, nasional dan pada level global, dan Organisasi Berita Nasional didirikan pada tahun 1973 guna menangani aduan pengguna media. Selain itu, usaha untuk mempertahankan kebebasan media juga dilaksanakan. Organisasi berita tersebut berakhir setelah hampir satu periode beroperasi. Ini disebabkan karena kurang mendapat dukungan dari media. Bagaimanapun, beberapa organisasi yang sama masih menjalankan aktivitasnya di Kota-kota besar atau di tingkat Nasional.

Komunis Soviet

Merril (1991), konsep terakhir yang dijelaskan dalam Four Theories of The Press adalah pendekatan dari segi Komunis Soviet. Ketiga-tiga teori di atas bagaimanapun dianggap asing oleh Negara-negara dari blok komunis dan mereka telah menciptakan teori Totalitarian

yang berasaskan, berlandaskan kepada prinsip-prinsip Marx, Lenin, Stalin dan pemerintahan diktator Partai Komunis, sewaktu lahir negara Uni Soviet. teori Totalitarian merupakan kelanjutan dari teori Autoritarian, dan menurut Siebert et al., ia sama seperti konsep Tanggungjawab Sosial yang disesuaikan dengan teori Libertarian. Seperti pers pada masa pemerintahan Autoritarian, pers Komunis Soviet mengabdikan untuk sebuah partai yang sedang memerintah. Tidak seperti pers dalam sistem Autoritarian, pers Soviet dimiliki oleh Negara. Perbedaan yang lain antara sistem Totalitarian dengan sistem Autoritarian menurut mereka adalah seperti yang berikut:

1. Sistem Soviet meminggirkan motif perintangan (penghalang); konsep Autoritarian mengutamakan.
2. Dalam sistem Soviet, penekanan dibuat untuk mendapatkan sesuatu masalah melalui pers; dalam sistem Autoritarian, pers dihambat untuk melakukan masalah tertentu.
3. Pers Soviet diminta untuk membantu usaha melaksanakan perubahan; pers

dalam sistem Autoritarian bertanggungjawab untuk memelihara status.

4. Media Soviet diintegrasikan dalam sebuah sistem komunikasi media; media sebuah Negara Autoritarian mempertahankan beberapa moralitas individu.

Dengan terciptanya penguasaan Negara dalam teori Komunis Soviet ini, maka setiap yang kalah dengan sistem Libertarian itu beranggapan bahwa pers Soviet menjadi korban dari ideologi yang menindas, sedangkan pers Libertarian dapat bernafas dengan lega. Tetapi dalam teori Marxist masalah sebaliknya dan dianggap satu kebenaran. Soviet mungkin berfahaman bahwa pers mereka bebas untuk mencurahkan suatu kebenaran, karena menurut mereka, pers dalam sistem Libertarian hanya dikuasai oleh beberapa atau segelintir perusahaan.

Tabel 1. Tipologi Sistem Pers Secara Umum

No.	Teori	Pendapat	Wakil-Wakil
01	Authoritarian	Kuasa mutlak pada pemerintah. pers sepenuhnya dikungkung atau dikendalikan.	Negara Eropa awal, kediktatoran modern di Afrika, Amerika latin dan dimana saja. Pemikiran Plato, Gutenberg dan Machiavelli
02	Libertarian	Kuasa sepenuhnya berada di tangan rakyat. Kebebasan pers pada tahap maksimum	Amerika Serikat, Inggeris, Eropa Barat, Jepang. Pemikiran Milton, Lock, Mill

03	Tanggungjawab Sosial	Pemerintah memberi kebebasan berpers kepada media supaya berfungsi sebaiknya berasaskan kesadaran social terhadap orang banyak.	Amerika Serikat, Inggris, Eropa Barat, Jepang. Pemikiran Hutchins,
04	Totalitarian atau Soviet Union	Media sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah. Asas-asas media ditentukan oleh pemerintah. Tidak ada kebebasan pers.	Soviet Union dan Negara-negara Komunis di Eropa Timur, Cuba, China. Pemikiran Marx, Lenin dan Stalin
05	Pembangunan	Pengawasan Partai dan/ atau pemerintah yang mengarah semua media.	Negara-negara bekas jajahan Barat/Rusia/di bawah pengaruh AS yang bukan industri dan bukan Komunis
06	Media Demokratik	Tidak diawasi oleh pemerintah dan dimiliki oleh masyarakat lokal	

Sumber : *Dirangkum dari berbagai sumber, 2008*

Tabel 2. Tipologi Sistem Pers Menurut Siebert et al.

Autoritarian	Libertarian	Komunis Soviet	Tanggung Jawab Sosial
Dimajukan dalam benua Eropa kurun yang ke-16 dan 17.	Dilahirkan di Inggris dalam akhir tahun ke 17; Berkembang di Amerika dan Benua Eropa.	Dilahirkan pada awal abad ke-20 di USSR.	Dilahirkan dalam pertengahan abad ke-20-an di Amerika serikat dari tradisi Libertarian.
Lahir dari kuasa mutlak raja.	Lahir dari keperluan untuk berfikir dan hak-hak yang utama.	Lahir dari Marx dan Lenin.	Lahir dari berbagai penulisan berhubung dengan Komisi kebebasan pers, dan dari kritik-kritik yang lain terhadap pers Libertarian.
Tujuan: Mendukung Negara dan pemimpin.	Tujuan: Membantu mencari kebenaran, menerangkan, me naksirkan, melayani.	Tujuan: Untuk mendukung system Marxist dan mengabdikan kepada rakyat.	Tujuan: Utamanya untuk menerangkan dan men didik, untuk membantu kemajuan social.
Perizinan, sensor, kuasa autoratik undang-undang.	Usaha sendiri pihak editorial; pengasing	Secara teori rakyat memiliki pers, dan mereka dapat menggunakannya.	
Dibenarkan kritikan yang tidak			

mengancam struktur kuasa	an antara pemerintah & pers.	Media dikuasai oleh pemerintah Partai Komunis.	Pers terbuka kepada setiap orang yang berhak menyatakan sesuatu.
Dimiliki oleh pemerintah, partai, atau perseorangan	Media dikuasai oleh pasar yang bebas dari segi idea dan pengadilan.	Media tidak boleh mengecam tujuan partai. Dimiliki oleh rakyat.	Tanggungjawab social pers adalah lebih penting dibandingkan dengan kebebasan pers itu sendiri.
Pelopr-pelopr: Hobbes, Hegel, Machiavelli.	Tidak dibenarkan menghalang penerbitan sebelum penerbitan dijalankan.	Penguasaan: Marx, Lenin, Stalin, mao, Castro, Gorbachev.	Dikuasai oleh pendapat masyarakat dan tindakan pengguna dan juga oleh kode etik jurnalistik, Dewan pers dsbnya.
Contoh-contoh: Iran, Paraguay, dan Nigeria	Pemilikan: Swasta Pelopor: Locke, Milton, Mill, Adam Smith. Contoh pada masa ini: Amerika serikat, Jepang, dan Jerman Barat	Contoh; Pada masa USSSR, China, dan Kuba.	Tidak dibenarkan penerbitkan yang mengancam kedudukan sosial atau mengganggu hak-hak pribadi. Pemilikan: Swasta dengan kemungkinan campuran dengan pemerintah untuk menjamin pelayanan kepada rakyat Contoh: Tidak ada, tetapi beberapa Negara coba menjalankannya termasuk AS.

Sumber: Dipetik dari Frederick S. Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm, dalam *Four theories of the press*. Urban. University of Illinois. 1956.

Mundt, Whitney R. (dalam Merrill, John C. 1991. p. 12) mengatakan Tipologi Siebert et al., begitu berpengaruh. Seperti John Merrill katakan dalam *the dialectic in journalism* (1989), “hampir setiap jurnal dan buku yang membicarakan dasar falsafahewartawanan mendiskusikan tentang empat teori ini, dalam bentuk mengkritik teori, atau mencatat sumber-sumbernya. Tetapi waktu telah melemahkan “*Four Theories of The Press*”. Teori ini tidak lagi dianggap sebagai model Komunis Soviet yang tepat. Ia tidak lagi sesuai dengan sistem

yang beraneka ragam, *plural*, seperti teori *pers revolutioner* yang telah berkembang semenjak 1956.

Ralph Lowenstein

Dalam tahun 1971, Ralph Lowenstein mengusulkan kajian terhadap semua tipologi empat teori tersebut karena beliau percaya bahwa model Sieber et al., tidak lagi fleksibel dan tidak bisa digunakan untuk mengkaji semua sistem pers yang ada di dunia. Dalam bukunya yang berjudul “*Media, Message, and Men* (Merril & Lowenstein: 1971), Lowenstein

mengusulkan satu pendekatan dua tingkat yang menentukan jenis-jenis pemilikan dan pahamannya. Contohnya, media mungkin dimiliki oleh swasta, didukung oleh pengiklanan dan pelanggan atau media mungkin dimiliki oleh beberapa partai politik yang bersaing, dengan subsidi dari sumbangan partai atau anggota partai, atau dimiliki oleh pemerintah, atau pembiayaan yang disediakan dari keuangan atau hasil iuran izin terbit atau siaran.

Sejalan dengan falsafah pers ini, Lowenstein mempertahankan perkataan ‘Autoritarianisme’ dan ‘Libertarianisme’ dan pengertian model Siebert et al., itu. Namun, ia melakukan perubahan terhadap dua perkataan yang lain untuk menghindarkan pengertian yang *konotatif* dan menyesatkan, ‘Komunis Soviet’ diganti dengan ‘Sosial-centralis’ yang digunakan untuk meminggirkan nilai-nilai negatif dalam perkataan aslinya disamping dapat memperluas pengertiannya. Sosial menjelaskan orientasi kolektif sistem komunis, sementara sentralis menjelaskan tentang realitas dari bimbingan yang tersentral dalam sistem pers Marxist. Tanggungjawab Sosial menjadi Libertarian sosial untuk menghindarkan dua pengertian yang menyesatkan dan untuk menggambarkan asal-usul teori ini dari konsep Libertarian. Perkataan baru membawa pengaruh yang lebih bermakna yaitu peraturan

media dapat mempertontonkan beberapa kepentingan umum.

Dalam 1979, Lowenstein mengkaji kembali falsafah persnya melalui edisi kedua buku *Media, Message, and Men* (Merrill & Lowenstein: 1979). Ia digambarkan seperti dalam Tabel 3. Sosial-centralis sekarang menjadi ‘Sosial Authoritarian’ untuk menunjukkan dengan jelas hubungan sistem pers dalam Negara Blok Timur dengan falsafah Authoritarian. Lowenstein kemudian menambah satu perkataan yang kelima dalam listnya; Sosial-centralis. Perkataan ini tidak boleh dicampur adukkan dengan perkataan yang sama yang beliau pernah gunakan pada tahap awal ketika menentukan sistem Negara-negara blok Soviet. Sistem pers ‘sosial-centralis’ adalah sistem yang menunjukkan kepemilikan media oleh pemerintah atau publik menjadi penting. Ini untuk memastikan adanya semangat pelaksanaan sesuatu falsafah Libertarian mereka’.

Dalam buku terbarunya yang berjudul “*Macromedia, Mission, Message and Morality*” (Lowenstein & Merrill: 1990), Lowenstein memberi satu gambaran sepenuhnya sehubungan dengan tipologinya yang dasarnya tidak diubah. Walaupun isinya sedikit banyak yang diedit.

Tabel 3: Tipologi Sistem Pers Menurut Lowenstein

No.	Pemilikan Pers	Falsafah Pers
1	Swasta: Kepemilikan oleh individu atau organisasi bukan pemerintah, didukung terutama sekali oleh pengiklanan dan pelanggan	Authoritarian: Izin Pemerintah dan sensor digunakan untuk menghapus kritikan dan sekaligus mengawasi kelompok elit yang memerintah
2	Berbagai partai: Pemilikan oleh beberapa partai yang bersaing dibantu oleh partai atau anggota partai.	Sosial Authoritarian; Pemerintah dan kepemilikan partai pemerintah yang mengembeling pers ke arah tujuan ekonomi dan falsafah nasional mereka.
3	Pemerintah; Dimiliki oleh pemerintah atau partai pemerintah yang berkuasa, dengan subsidi utama oleh Sumbangan pemerintah	Libertarian; Tanpa pengawasan pemerintah (kecuali untuk undang-undang pencemaran

	atau hasil iuran izin yang diambil oleh pemerintah.	nama baik dan pornografi). Menjamin pasar idea yang bebas operasi proses pembetulan berlaku dengan sendirinya.
4		Sosial Libertarian; Minim pengawasan pemerintah ke arah membuka saluran-saluran komunikasi & menjamin pelaksanaan sesuatu falsafah Libertarian.
5		Sosial-centralis; Pemilikan pemerintah atau publik terhadap saluran komunikasi yang terbatas untuk menjamin pelaksanaan sesuatu falsafah Libertarian.

Sumber: John C. Merrill dan Ralph L. Lowenstein. 1979. *Media, Message and Men*. New York. Longman.

John Merrill

John Merrill menganggap model Lowenstein 'lebih canggih dan realistik' jika dibandingkan dengan model Siebert et al. Tetapi pada dasarnya, konsep social-libertarian, Lowenstein bertentangan. Merrill memberi pandangan dalam bukunya yang berjudul "*The Imperative of Freedom*" (1974), yaitu suatu falsafah tidak boleh menjadi libertarian (bebas) dan pada saat yang sama menjadi sistem terarah (diawasi). Mengikut Merrill, model Lowenstein dan model Siebert et al., memiliki satu lagi kelemahan yang mendasar. Kedua-duanya mengusulkan satu bentuk spektrum, yaitu Authoritarian dari satu segi dan Libertarian dari segi yang lain. Skim ini dianggap satu model 'pigeonhole' dan sistem media itu hanya digambarkan secara eksklusif dan bebas satu sama lain.

Dalam keadaan tersebut Merrill mengusulkan satu 'putaran pers politik' yaitu sebuah model yang meletakkan Libertarian pada posisi di atas dan Authoritarian di bawah dalam satu lingkaran tertutup. Dalam model ini, empat teori dikurangkan kepada dua yang dikenal sebagai yang mirip Authoritan atau yang mirip Libertarian. Kedua-dua teori tersebut berwarna bebas, atau perubahan dari kebebasan kepada satisma. Kedua teori tersebut

bergerak ke arah mana saja; Kiri, melalui Sosialisme, atau kanan, melalui Kapitalisme.

Pada bagian lain Merrill (1974. p. 34), mengatakan walaupun keempat-empat teori yang dikemukakan oleh Siebert et al., itu mempunyai pengaruh yang besar, beliau merasa ada kelemahan signifikan dalam teori dimaksudkan. Merrill merasa cukup ganjil di mana penggagas keempat-empat teori itu merasa puas dengan tipologi mereka, khususnya dengan konsep Tanggungjawab Sosial yang diletakkan sejajar dengan Authoritarian, Kebebasan, dan Komunis. Sebenarnya, Menurut Merrill, keempat-empat teori itu adalah tidak sejajar, kesejajaran secara logika sesuai sekali untuk Authoritarian, Kebebasan, dan Komunis, tetapi bagi Teori Tanggungjawab Sosial ada sedikit masalah. Beliau berargumentasi bahwa dengan Teori Tanggungjawab Sosial, memberi implikasi yang kuat terhadap ketiga-tiga teori lain dipahami "tidak bertanggungjawab", dan sistem pers Authoritarian, Kebebasan, dan Komunis tidak bisa bertanggungjawab terhadap masyarakat mereka (p. 36).

William Hachten

William Hachten membuat beberapa perubahan penting terhadap model empat teori seperti yang

telah diusulkan dalam tahun 1956. (Model Lowenstein dan Merrill secara umumnya merupakan penelitian terhadap tipologi asal yang dikemukakan oleh Siebert et al.). Dalam bukunya yang berjudul "*The World News Prims*" (1981), Hachten mengusulkan satu tipologi, lima konsep, yang juga mempertahankan ideologi Authoritarian dan Komunis bersama dengan teori Libertarian dan Tanggungjawab Sosial. Ini dinamakan konsep Barat dan ditambah dengan dua teori yang baru, yaitu; Teori Revolusioner dan Pembangunan.

Hachten menganalisa konsep Revolusioner itu sebagai penggunaan media massa yang tidak beraturan dan subversif, bertujuan kearah menggulingkan sebuah pemerintahan. Samuel Adams dan Thomas Paine adalah contoh tentang konsep kewartawanan yang Revolusioner dalam sejarah Amerika Serikat. Hachten menyatakan Pravda yang didirikan dalam 1912 itu sebagai 'satu contoh konsep Revolusioner yang baik'. (Lenin mengusulkan penggunaan sebuah undang-undang pers yang menawarkan liputan Pendirian Revolusioner). Hachten seterusnya menyatakan terdapat satu lagi contoh pada satu waktu melalui penggunaan pita audio atau mesin pendua seperti yang dilakukan oleh pendukung Ayatollah Khomeini dalam usaha menjatuhkan Shah Iran.

Hachten seterusnya berkata konsep Pembangunan itu adalah satu gubahan kepada teori Authoritarian. Ia meletakkan peranan media massa dalam usaha pembangunan Negara. Perancangan pembangunan kewartawanan percaya bahawa media massa digerakkan untuk membantu pembangunan ekonomi, penghapusan buta huruf, dan pendidikan politik. Juga, media boleh menyokong pihak berkuasa, mengelakkan usaha-usaha pembangunan Negara yang terencat. Aliran berita yang digerakkan oleh wartawan asing hendaklah tertakluk kepada

kedaulatan sesebuah Negara atas alasan yang sama. Memandangkan informasi adalah sumber-sumber nasional, dengan itu, ia hendaklah digunakan ke arah matlamat-matlamat nasional. Hak bersuara adalah pembantu kepada pencapaian matlamat tersebut.

Hachten (1981; 62), walaupun tetap menerima dua dari teori yang dikemukakan oleh Siebert et al., yaitu Autoritarian dan Komunis, tetapi mencantumkan Teori Kebebasan dengan Tanggungjawab Sosial dan menamakannya dengan Konsep Barat. Selain itu, Hachten memperkenalkan dua konsep lain, yaitu Revolusioner dan Pembangunan.

Pers revolusioner adalah pers yang sangat diyakini oleh rakyat bahwa pemerintah tidak mampu memenuhi kepentingan mereka dan kerananya harus diganti. Mereka tidak sudi memberikan kesetiaan kepada kerajaan. Contoh, siaran radio yang menjadi alat bagi kelompok revolusioner yang berusaha menjatuhkan pemerintahan rapuh di negara-negara bekas jajahan di Asia dan Afrika setelah Perang Dunia Kedua.

Konsep pembangunan merupakan pandangan komunikasi massa dari banyak negara Asia dan Afrika yang rakyatnya memiliki keanekaragaman warna kulit, kemiskinan, tingkat gizi rendah, buta huruf dan sebagainya, yang menyimpan kebencian terhadap Eropa Barat, khususnya Amerika Serikat dan Inggeris, yang rakyatnya terutamanya di Kaukasia (kecuali Jepang), makmur dan melek huruf.

Hachten menjelaskan bahawa rukun asas analisisnya ialah semua sistem akhbar mencerminkan sistem politik dan ekonomi negara-negara di mana ia beroperasi. Pada asasnya Hachten menerima landasan sistem politik, tetapi terpaksa menambah dua lagi konsep untuk merangkumi sistem yang terkeluar daripada konsep yang diterimanya, iaitu Autoritarian dan Komunis.

Tabel 4. Tipologi Sistem Pers Menurut William Hachten

Jenis	Pengawasan	Kebijakan	Wakil-wakil
Authoritarian	Publik dan Swasta Subordinate kepada negara	Media bisa beroperasi jika tidak terdapat kritik an terhadap pemerintah atau kritikan. Sensor secara langsung atau tidak langsung	Negara Eropa yang awal, kediktatoran modern di Afrika, Amerika latin dan dimana saja
Barat (Libertarian Tanggungjawab Sosial)	Pemilikan pers swasta; sistem penyiaran swasta dan publik	Penekanan terhadap kebebasan dari pengaruh pemerintah, tetapi dengan tanggungjawab menjalankan tugas	Amerika Serikat, Inggris, Eropa Barat, Jepang.
Komunis	Media sebagian Partai Komunis atau pemerintah. Tidak ada kepemilikan swasta	Penekanan terhadap menyuarakan pandangan dan kebijakan resmi; menggerakkan dukungan untuk kemajuan nasional	Uni Soviet dan Negara-negara Komunis di Eropa Timur, Cuba, China
Revolusioner	Media haram atau subversif. Tidak dikuasai oleh pemerintah	Media bawah tanah, selalu bergerak dari luar Negara. Berusaha untuk menjatuhkan pemerintah	Media bawah tanah dalam masa penjajahan & perang pers colonial disebahagian Asia dan Afrika.
Pembanguna	Pengawasan partai dan/ atau pemerintah mengarah ke semua media	Mobilisasi media untuk mengabdikan kepada tujuan nasional dalam pembangunan; interasi politik; kampanye terhadap kemiskinan, penyakit dan buta huruf	Negara-negara ketiga di dunia yang bukan industri dan bukan Komunis

Sumber : *William Hachten, The world news prim, 1981. Ames. Iowa State University Press*

Dennis McQuail

Pada tahun 1983 *McQuail (1983)* merumuskan enam teori norma media, empat daripadanya teori teori yang dikemukakan oleh Siebert et al., dengan menukarkan nama Kebebasan kepada Teori Kebebasan Akhbar dan Komunis soviet menjadi Teori Media Soviet, manakala Authoritarian dan Tanggungjawab Sosial kekal

dengan nama asal. McQuail (1983) menambah dua teori lain, iaitu Teori Pembangunan Media dan Teori Penyertaan Demokrasi Media (Democratic-participant media). McQuail (1983) tidak menyebut tentang sumbangan Hachten walaupun terdapat sedikit amaran dari segi label Konsep Pembangunan oleh Hachten dengan Teori Pembangunan Media oleh

McQuail kerana McQuail mengasaskan teori itu kepada laporan Suruhanjaya McBride yang ditubuhkan oleh UNESCO.

McQuail (1987; 111-122) menganggap usaha pertama dalam memberi kenyataan perbandingan teori-teori akhbar yang utama oleh Siebert et al., masih menjadi sumber utama dan titik rujukan bagi kerja-kerja seperti ini. Selain empat teori itu, McQuail menyebut dua jenis yang lain, iaitu Teori Media Pembangunan dan Teori Penyertaan Demokratik Media sebagai menghayati perkembangan pemikiran yang lebih mutakhir. McQuail (1987; 111-123)

berpendapat ada kemungkinan ‘empat teori’ asal masih mencukupi untuk mengelaskan sistem media, tetapi sebagaimana yang disadari oleh pengarang-pengarang asal, biasanya sistem media sebenar dicirikan oleh prinsip falsafat yang beralternatif, meskipun tidak kekal. Oleh yang demikian, menurut McQuail (1987; 111-123) adalah tidak salah untuk menambah teori kepada set yang asal, sekalipun jika teori-teori ini tidak betul-betul selaras kepada sistem media yang lengkap, kerana teori-teori ini kini menjadi sebahagian daripada prinsip dasar media dan amalan semasa.

Tabel 5. Tipologi sistem Pers menurut McQuail

Jenis	Pengawasan	Kebijakan	Wakil-Wakil
Kebebasan Pers	Kepemilikan pers swasta; sistem penyiaran swasta dan publik	Penekanan terhadap kebebasan dari pengaruh pemerintah, tetapi dengan tanggungjawab menjalankan tugas	Amerika Syarikat, Inggeris, Eropa Barat, Jepang.
Media Soviet	Media sebagian Partai Komunis atau pemerintah. Tidak ada kepemilikan swasta	Penekanan terhadap menyuarakan pandangan & kebijakan resmi; menggerakkan	Uni Soviet dan Negara-negara Komunis di Eropa Timur, Cuba, China
Autoritarian	Publik dan Swasta Subordinate kepada negara	dukungan untuk kemajuan nasional Media boleh beroperasi jika tidak terdapat kritikan terhadap pemerintah atau pembangkangan.	Negara Eropa yang awal, kediktatoran modern di Afrika, Amerika Latin dan dimana saja
Tanggungjawab Sosial	Pemilikan pers swasta; sistem penyiaran swasta dan publik	Sensor secara langsung atau tidak langsung	Amerika Serikat, Inggeris, Eropa Barat, Jepang.
Pembangunan Media	Pengawasan partai dan/ atau pemerintah yang mengarah semua media	Penekanan terhadap kebebasan dari pengaruh pemerintah, tetapi dengan	Negara-negara dunia ketiga yang bukan industri & bukan Komunis

		tanggungjawab menjalankan tugas
Penyertaan Demokrasi Media	Tidak dibina dan diawasi oleh pemerintah serta menghendaki adanya kebebasan pers	Mobilisasi media untuk pengabdian kepada tujuan nasional dalam pembangunan; interasi politik; kampanye terhadap kemiskinan, penyakit dan buta huruf
		Modal yang memper lakukan penyiaran sebagai aktivitas yang melakukan proses pertukaran pesan secara dua arah. Tolak media yang seragam, sentralistik dan mahal

J. Herbert Altschull

Pada tahun 1984, J. Herbert Altschull menerbitkan buku yang berjudul *Agents of Power*, sebuah buku yang sebagiannya ditulis untuk menghormati wartawan yang berusaha ‘untuk membebaskan diri mereka dari kungkungan ideologi masyarakat mereka dan bertindak lebih jauh dari norma konflik yang menguasai kebudayaan mereka’. Dalam konteks ini, tidak mengherankan jika Altschull menolak terminologi yang digunakan dalam ‘Empat Teori Pers’ berlandaskan nilai ‘*value-laden*’. Menurut mereka bentuk tipologinya, Altschull memilih ‘penggunaan ekonomi yang disesuaikan’ sejalan dengan pembentukan Negara Pertama, Kedua dan ketiga. Negara Pertama atau Dunia Barat menjadi aliran ‘Pasar’; Kedua atau Dunia Timur menjadi aliran ‘Marxis’; dan Ketiga atau Dunia Selatan menjadi aliran ‘Pembangunan’.

Altschull mengkaji ketiga-tiga aliran tersebut dari tiga perspektif, tujuan kewartawanan, pegangan pers, dan pandangan yang berhubungan dengan kebebasan pers.

Analisisnya bergerak dari usaha konvensional dalam beberapa kondisi, contoh, Altschull percaya kebenaran itu adalah tujuan akhir sebuah surat kabar (pers) dalam ketiga teori sebelumnya dan digunakan sebagai satu tindakan yang bertanggungjawab terhadap pembangunan sosial.

Altschull juga melihat bahwa ketiga aliran itu dari perspektif ‘konsep kepercayaan’ mereka, atau dari segi keyakinan yang dipegang kuat bahwa mereka tidak tunduk kepada analisa yang rasional. Contoh, Alstchull melihat konsep kewartawanan Barat (pasar) sebagai sebuah pers yang bebas dari campur tangan pengiklan dan pengaruh lain. Dalam aliran Marxist, mereka sebenarnya yakin untuk dapat menggunakan dengan baik pilihan mereka sendiri dan pers mereka berwarna pendidikan dan bukannya propaganda. Alstchull mendapat idea di kalangan wartawan Negara maju begitu menarik. Bagi mereka pers menjadi instrument kepada komunikasi dua arah atau untuk berdialog. Menurutnya, wartawan pasar bebas mempunyai hak untuk mengetahui sesuatu,

tetapi pembaca tidak mempunyai hak untuk memberitahu wartawan tentang apa yang hendak mereka ketahui. Dengan perkataan lain, menurut Altschull, wartawan pasar bebas bertanggungjawab memberitahu pembaca sebagai hak pembaca untuk mengetahuinya. Sementara itu, dalam dunia Marxist, para jurnalis menghadapi satu tekanan dan media mengabdikan untuk keperluan masyarakat dengan menyerahkan dahulu pendapat mereka kepada editor.

Dari segi perspektif mereka, kebebasan pers dalam ketiga-tiga aliran tersebut berbeda dengan sangat jelas. Ini menurut pendapat Altschull. Contoh, wartawan pasar dalam sebuah pers yang independen tidak mengabdikan kepada pihak penguasa; wartawan Marxist dalam pers independen diperlukan untuk menghadapi tekanan; dan kepada seorang wartawan dalam Negara membangun, kebebasan pers tidak begitu penting atau kurang penting dibandingkan dengan kepentingan sebuah Negara. Dari segi kebijakan pers nasional, terdapat perbezaan antara ketiga

aliran tersebut. Contoh menurut Altschull, wartawan pasar bebas percaya bahwa sebuah kebijakan pers tidak diperlukan untuk menjamin keberadaan sebuah pers yang independen. Altschull mungkin menulis, 'wartawan pasar bebas percaya bahwa untuk menjamin sebuah pers yang independen, tidak diperlukan adanya kebijakan pers', wartawan Marxist percaya bahwa sebuah kebijakan pers diperlukan untuk menjamin pers yang independen, sedangkan wartawan dalam aliran Negara membangun percaya, sebuah kebijakan pers diperlukan untuk menyediakan pengawasan undang-undang dan hak kebebasan.

Klasifikasi Altschull mengabaikan atau setidak-tidaknya menggugat beberapa pendekatan yang dipegang oleh wartawan Barat. Biasanya, wartawan Barat menghormati semua media yang manut dan bersekongkol dengan ideologi mereka. Suatu kebenaran fakta merupakan hasil dari usaha mereka, sementara unsur propaganda atau ekonomi itu merupakan sifat kewartawanan yang biasa dan berlaku di mana saja.

Tabel 6. Tipologi sistem Pers menurut Alstchull

Pasar (Dunia Pertama)	Marxist (Dunia Kedua)	Membangun (Dunia Ketiga)
Wartawan mencari kebenaran.	Wartawan mencari kebenaran.	Wartawan mencari kebenaran.
Wartawan bertanggungjawab dari segi social.	Wartawan bertanggungjawab dari segi sosial	Wartawan bertanggungjawab dari segi sosial
Wartawan menerangkan dalam cara bukan politik	Wartawan mendidik dalam cara politik	Wartawan mendidik dalam cara politik
Wartawan sebagian mengabdikan kepada rakyat & mendukung kapitalisme	Wartawan mengabdikan kepada rakyat dengan meminta dukungan untuk sosialis	Wartawan mengabdikan kepada rakyat & pemerintah dgn cara mencari perubahan.
Wartawan bertindak sebagai pengawas pemerintah	Wartawan merubah pendapat & merubah suatu pandangan	Wartawan mengabdikan sebagai alat keamanan.

Pers bebas dari campur tangan luar	Pers mengajar pekerja2 untuk mencapai kesadaran.	Pers bersatu; ia tidak berpecah.
Pers mengabdikan dan memastikan hak-hak publik untuk mengetahui sesuatu.	Pers Mengabdikan untuk keperluan rakyat	Pers bekerja untuk perubahan social.
Pers berusaha untuk mempelajari dan menunjukkan kebenaran	Pers memudahkan perubahan yang objektif	Pers sebagai satu instrument keadilan social
Pers melaporkan dengan adil dan objektif.	Pers melaporkan secara objektif berkaitan dgn realitas	Pers sebagai roda untuk perubahan dua arah
Sebuah pers bebas bermakna bahwa wartawan bebas dari semua pengawasan luar.	Sebuah pers bebas melaporkan semua pendapat bukan saja di kalangan orang kaya.	Sebuah pers bebas bermakna kebebasan menyuarakan perasaan kepada wartawan
		Kebebasan pers kurang penting dibandingkan dgn kepentingan sebuah Negara
		Sebuah kebijakan pers nasional diperlukan untuk melindungi kebebasan

Sumber : Altschull, J. Herbert, 1984. *Agents of power. White Plains, NY. Longman.*

Robert Picard

Dalam tahun 1985, Robert Picard mengusulkan penyesuaian yang penting terhadap Tipologi Lima Konsep Hachten. Dalam bukunya yang berjudul *“The Press and the decline of democracy”* Picard mengusulkan pendekatan Sosialis Demokratik hendaklah diketahui sebagai sub-kategori kepada konsep Barat Hachten, kita mungkin merujuk kembali, dan menyifatkan teori Libertarian dan Tanggungjawab Sosial sebagai teori Barat. Namun beliau menerima teori ‘Pembangunan dan Revolusioner’ sebagai satu sumbangan yang besar kepada bidang pemikiran isu falsafah media global. Teori Tanggungjawab Sosial adalah semata-mata satu pengembangan dari teori Libertarian (dan sebenarnya keduanya dapat saling membantu dalam sebuah media yang tunggal di Amerika Serikat pada masa ini), Hachten percaya teori itu baik jika disatukan di

bawah satu “Tema-Barat. Picard memasukkan ‘Sosialisme Demokratik’ seiring dengan Teori Tanggungjawab Sosial dan Libertarian yang saling bersamaan dalam Teori Barat itu.

Teori pers Sosialis Demokratik, seperti Teori Tanggungjawab Sosial, berpegang bahwa media mempunyai tanggungjawab mengizinkan keanekaragaman suara. Tetapi pendekatan Sosialis Demokratik yang dimajukan di Eropa Barat, membolehkan pemerintah untuk campur tangan dalam ekonomi atau kepemilikan media direstui untuk menjamin kesinambungan pers serta menjamin rakyat untuk terus dapat menggunakannya. Picard menulis “sebenarnya, kepemilikan di bawah sebuah sistem media mungkin melalui institusi publik yang tidak mencari keuntungan, melalui beberapa yayasan, atau organisasi yang bukan mencari keuntungan atau koperatif yang

dikendalikan oleh wartawan-wartawan, dan organisasi kolektif yang lain”.

Ini merupakan satu konsep yang amat berbeda dari Teori Libertarian dan bahkan berbeda dengan falsafah Tanggungjawab Sosial seperti yang digariskan dalam “*Four Theories of The Press*”. Ia hendaklah dipahami sebagai satu teori yang baru ada yaitu sebuah teori akhbar yang keenam. Picard mengakui teori ini mempunyai perbezaan yang radikal dibandingkan dengan teori tradisional seperti dalam penulisannya, yaitu di bawah teori “Sosial Demokratik, media dilihat sebagai instrument rakyat yaitu alat untuk menyebarkan idea, pujian dan kritikan terhadap pemerintah dan masyarakat”. Dalam sistem demikian, “media dikendalikan dan digunakan oleh rakyat ke arah perlindungan hak-hak sosial, ekonomi dan politik rakyat”.

Dalam skemanya (seperti terlihat di bawah ini), Picard menggabungkan Sosial Demokratik dengan Teori Libertarian dan Tanggungjawab Sosial di bawah Teori Barat. Tetapi dalam kelompok yang sama, Picard meletakkan Teori Sosial Demokratik di bawah judul “Terimbang atau tidak menentu”. Seiring dengan Teori Revolusioner dan Pembangunan, Picard selanjutnya menyifatkan kedua-dua teori, yaitu Libertarian dan Tanggungjawab Sosial sebagai ‘Mirip Libertarian’. Disain organisasi ini menghasilkan satu konflik idea yang tidak bisa ditangani dengan mudah, atau setiap usaha yang bertolak ansur mungkin akan ditolak. Lebih mudah untuk menggerakkan Teori Sosial Demokratik ke arah satu status yang paling bersamaan dengan Teori Revolusioner dan Pembangunan. Seseorang mungkin melupakan judul “Barat” (yang mana semata-mata sebagai satu faktor geografi di samping sebagai satu cara yang menunjukkan hubungan yang sangat erat antara Teori Libertarian dan Teori Tanggungjawab Sosial). Kemudian Picard memegang Teori Libertarian dan Tanggungjawab Sosial secara bersamaan antara yang satu dengan yang lain. Akhirnya,

seseorang boleh mengabaikan suffix (akhiran) yang bermirip dengan “Teori Authoritarian” dan “Libertarian” serta perkataan di bawah judul “Tertimbang atau Tidak Menentu”. Tipologi Picard yang ringkas ini meminggirkan sistem klasifikasi “Pigeonhole”, yang mudah berubah dan bukannya tetap, bergerak melalui satu system yang terancang dan dinamik dan tidak lagi statik. Teori Authoritarian dan Libertarian hanya berteori dengan konsep yang eksklusif. (Perubahan tersebut meminggirkan masalah yang tidak masuk akal dalam satu-satu tipologi dan menggariskan “Authoritarian” di bawah judul “Mirip Authoritarian dan Libertarian” di bawah judul “Mirip Libertarian”).

Walaupun terdapat kekurangan dari segi organisasinya atau kurang masuk akal nya teori dalam tipologi Picard, namun pengakuan terhadap konsep Sosial Demokratik ini dapat menutup beberapa isu yang berkaitan. Satu lagi masalah yang belum ditangani sepenuhnya. Ini berkaitan dengan kajian pendidikan melihat kedua-dua konsep tersebut saling berkaitan erat apabila dihubungkan dengan pengawasan pemerintah. Contoh, kalangan pelajar dan pengusaha-pengusaha media meletakkan Amerika Serikat sebagai Negara yang memperaktekkan, melaksanakan konsep Libertarian. Tetapi hanya berlaku dalam bidang media cetak, sedangkan untuk media penyiaran tunduk kepada perundang-undangan yang lebih memaksa dan restriktif semenjak awal industri tersebut.

Perusahaan penyiaran Amerika Serikat hendaklah mempunyai hak yang bebas untuk menjawab berbagai kritikan terhadap peranan dan integriti mereka sendiri. Ini perlulah dilakukan secara bebas. Di bawah syarat-syarat tertentu, perusahaan penyiaran hendaklah memberi waktu yang sesuai kepada anggota politik untuk membuat pertimbangan dengan sepantasnya. Contoh, program yang tidak sehat yang bersifat lucah tidak semestinya dihambat penyiarannya dalam masa-masa tertentu. Produk komersial tertentu mungkin tidak akan

kepentingan social lain yang diakui.

Membenarkan pemilikan publik (bukan Negara) bukan menguntungkan, dan (pada masa ini) entitas swasta.

Berbeda dengan lain-lain teori. Dalam media tersebut, ia tidak diawasi oleh pemerintah, atau kepentingan ekonomi dan social.

Sumber : *Robert G. Picard. 1985. The Press & the decline democracy. Westport, Con. Greenwood pres*

Sydney Head

Tidak ada satupun tipologi yang dibicarakan hingga saat ini yang mengurus masalah media penyiaran dan media cetak secara lebih terperinci, walaupun perbedaan tersebut lahir dalam beberapa Negara selain dari Amerika Serikat. Konsep Lowenstein menyatakan perbedaan antara penyiaran dan media cetak, tetapi Lowenstein tidak berhasil menggunakan analisa yang lebih mendalam. Seseorang terpaksa mencari satu model yang dipahami sesuai mengingat kajian media massa internasional belum memberi perhatian yang lebih serius terhadap masalah perbedaan antara media cetak dan penyiaran.

Sydney Head, pengarang buku yang berjudul *“World Broadcasting System”* (1985) menjelaskan satu model yang dapat dipergunakan tentang hubungan antara pemerintah dan media dalam bidang penyiaran internasional. Beliau melihat Amerika Serikat dan Inggris, walaupun mempraktekkan konsep demokrasi Barat, masih melahirkan “stail (gaya) yang agak berbeda dari segi kepemilikan dan pengawasan melalui undang-undang terhadap sistem penyiaran nasional mereka, dan USSR masih menggunakan corak – warna - yang lain. Head menulis model Amerika Serikat menggalakkan operasi dan

kepemilikan harta penyiaran melalui perdagangan bebas, model Inggris dengan monopoli kepemilikan dan pengawasan terhadap stasiun Negara melalui perusahaan publik, dan USSR menganut dimiliki dan diawasi oleh pemerintah. Head menyifatkan system US sebagai “Permisif”, Inggris sebagai “Paternalistik”, dan USSR sebagai “Authoritarian”.

Sistem permisif tergantung kepada tekanan (kekuasaan) pasar dan keinginan dari pengguna (*user*), sistem paternalistik tidak menekankan tekanan pasar, sebaliknya menekankan pada kebutuhan pengguna dan bukannya keinginan, dan menghindarkan penguasaan, baik oleh pemerintah atau pengiklan, Sistem Authoritarian meminimumkan kedua-duanya yaitu faktor pasar dan pilihan pengguna disamping memberlakukan peraturan tertentu. Media beroperasi sebagai agen resmi pemerintah.

Dengan menggunakan pedoman dari UNESCO yang diterbitkan dalam tahun 1982, Head merumuskan persentase kepemilikan dalam setiap kategori media berdasarkan pada 184 sistem radio dan 131 sistem televisi yang ada pada saat itu. Pada system radio, 49% dimiliki oleh pemerintah, 21% dimiliki oleh perusahaan publik, dan 21% oleh perusahaan

komersial swasta. Sedangkan pada system televisi, 49% dimiliki oleh pemerintah, 22% oleh perusahaan publik, dan 16% oleh perusahaan swasta komersial. Sistem radio dan televisi yang lain adalah dibentuk melalui berbagai kepemilikan.

Pekerjaan menyediakan list, menganalisa angka, mewujudkan beberapa tipologi, dan mengklasifikasikan data merupakan permainan ahli akademik. Ia bisa bergerak satu langkah ke depan. Permainan tersebut memberi sumber informasi dan bermanfaat untuk tujuan pendidikan. Tetapi, dunia sebenarnya dikuasai oleh pengusaha media yang menghadapi berbagai rintangan dalam urusan bisnis mereka yang terbatas. Permasalah-permasalahan ini dihadapkan kepada seseorang yang menjalani pekerjaan

dalam bidang industri media. Seorang wartawan hanya mendapat dukungan yang amat kecil, baik dari sisi praktek ataupun teori, meskipun beranekaragam kajian akademik telah dihasilkan. Dalam sistem apa saja, baik sistem independen, diawasi, atau yang random - acak - (tidak jelas) seorang wartawan terpaksa berhadapan dengan berbagai keputusan dan rencana perusahaan mereka. Bagaimanapun, semua tipologi yang dibicarakan di sini, dalam bentuk teori, bisa menjadi dasar bagi profesi kewartawanan. Tipologi tersebut terus menjadi kebiasaan ataupun pekerjaan di kalangan profesional dalam bidang industri media pada masa yang akan datang.

Tabel 8. Tipologi sistem Pers menurut Robert Picard

Model Amerika Serikat	Model Inggris	Model Uni Soviet
Amerika Serikat menggalakan operasi dan kepemilikan harta penyiaran melalui perdagangan bebas	Model Inggris memberi kepemilikan monopoli dan pengawasan terhadap stasiun Negara melalui perusahaan publik	USSR menganut kepemilikan dan pengawasan pemerintah
Sebuah sistem permisif bergantung pada tekanan pasar dan keinginan pengguna	Sistem paternalistik tidak menekankan tekanan pasar, sebaliknya menekankan keperluan, pengguna dan bukannya keinginan dan mengelakkan penguasaan baik oleh pemerintah atau pengiklan	Sistem Authoritarian meminimumkan kedua-duanya yaitu faktor pasar dan pilihan pengguna disamping mengenakan peraturan tertentu. Medianya beroperasi sebagai agen resmi pemerintah

Sumber: Diolah dari buku *Head, 1985*.

SIMPULAN

Kajian tentang sistem pers menurut beberapa pakar mengalami apa yang disebut dengan proses evolusi, mulai dari teori awal yang

dikemukakan oleh Siebert dan kawan-kawan dengan sifatnya yang masih umum. Teori sistem pers secara umum. Dikenal dengan nama *the fourth theories of the press*. Hingga yang bersifat umum, dalam bentuk teori sistem media

penyiaran, seperti yang dikemukakan oleh Head dan beberapa pakar komunikasi sebelum dan setelahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Altschull, J. Herbert, 1984. *Agents of power*. White Plains, NY. Longman
- Hachten, W.A. 1996. *The world new prism: Changing media of international communication*. Ames: The Iowa State University Press. Library International Islamic University.
- Hachten, William. 1981. *The world news prim*. Ames. Iowa State University Press
- Hasim, Mohd. Safar. 2004. *Akhbar dan Kuasa: Perkembangan Sistem Akhbar di Malaysia Sejak 1806*. Universiti Malaya. Kuala Lumpur
- Head, S.W. 1985. *World broadcasting system: A comparative analysis*. California: Wadsworth Publishing Company.
- Iskandar, M. Tuah (1997). *Mengislamkan Komunikasi Warta*. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.
- McQuail, D. 1983. *Mass communication theory: An introduction*. London; Sage publications.
- Merrill, J.C. (pnyt.). 1991. *Global journalism: Survey of international communication*. Edisi ke-2. New York: Longman.
- Merrill, J.C. & Ralph L. 1979. *Media, messages, and man: New perspective in communication*. Edisi ke-2. New York: Longman.
- Mundt, Whitney R. (dalam John Merrill, 1991), *Global Journalism; Survey of International Communication*. Second edition. London. Addison Wesley Longman).
- Robert G. Picard. 1985. *The Press & the decline democracy*. Westport, Con. Greenwood pres
- Siebert, F.S., Peterson, T. & Schramm, W. 1956. *Four theories of the press*. Urbana: University of Illinois Press.
- Siebert, F., S., Peterson, T. & Schramm, W. 1987. *Empat teori akhbar*. Terj. Syamsudin Abdul Rahim. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Syed Arabi Idid. 1989. Malaysia. Dlm. A. Mehra. *Press systems in Asean State*, hal. 41-56. Singapura. Asian Mass Communication Research and Information Centre.